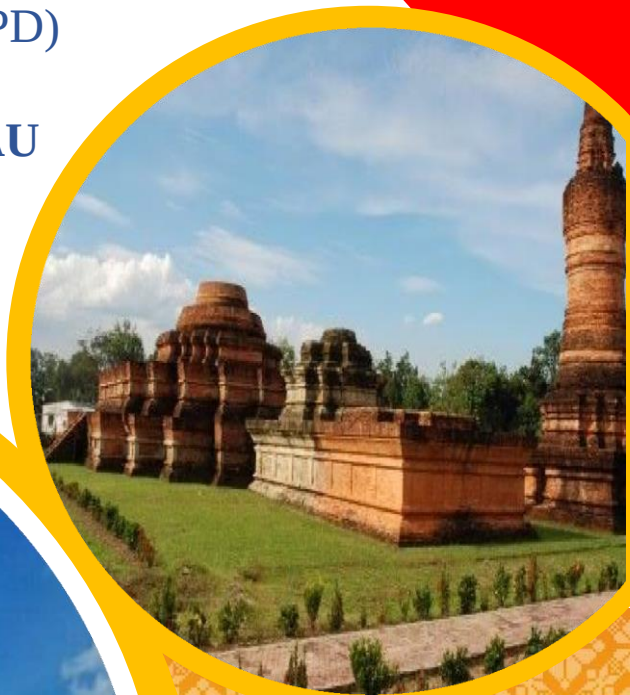




Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)
Provinsi Riau Tahun 2025
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU





GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR **23** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 23

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau resmi dibentuk berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016, sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau.

Rencana kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan tahun dimana perencanaan setelah tahun 2024 yang merupakan implementasi dari Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau periode 2025-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada RENSTRA Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026. Diharapkan nantinya RENJA Tahun 2025 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 guna meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi Dinas maupun mitra kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, sehingga Rencana Kerja ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini.

Pekanbaru, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau

R. YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Madya

NIP. 19681107 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	34
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
2.6 Kelompok Sasaran Layanan	61
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	62
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	62
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	63
3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
BAB V PENUTUP	84
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	84

5.2	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	84
5.3	Rencana Tindak Lanjut	85

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja	16
Tabel 2.2 (T-C30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 2.3 Realisasi Pemajuan Budaya Melayu Riau	35
Tabel 2.4 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018 – 2023	38
Tabel 2.5 Capaian Provinsi Riau terkait 7 dimensi	39
Tabel 2.6 Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2023	39
Tabel 2.7 (T.C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	48
Tabel 2.8 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	57
Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional	32
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025	63
Tabel 3.3 (T-C.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Pemerintah Provinsi Riau	65
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Diagram Proses Penyusunan Renja	2
Gambar 1.2	Diagram Keterkaitan Dokumen	4
Gambar 2.1	IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi Riau	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja adalah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan dinas, RENJA "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

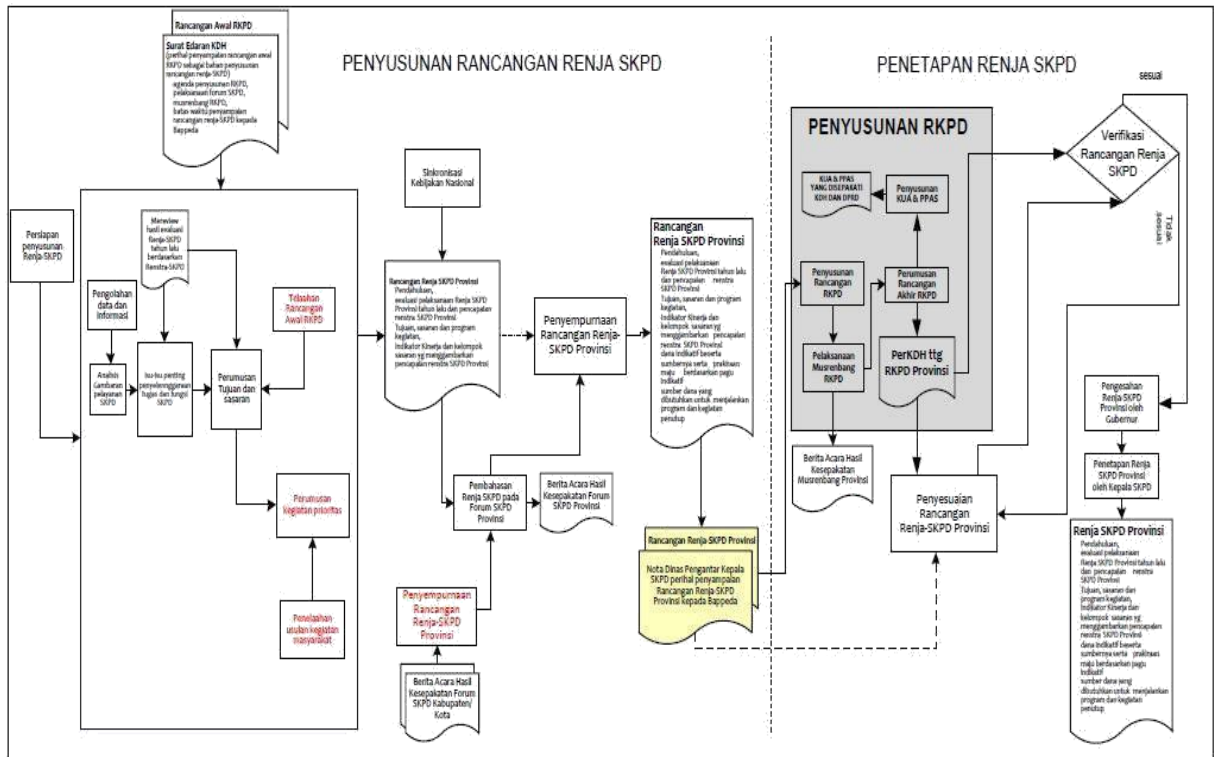
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dijelaskan dari diagram pada Gambar 1 dengan uraian sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
- b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

Gambar 1.1 Diagram Proses Penyusunan Renja



2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:

- Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan
- Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDALITBANG Provinsi Riau dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

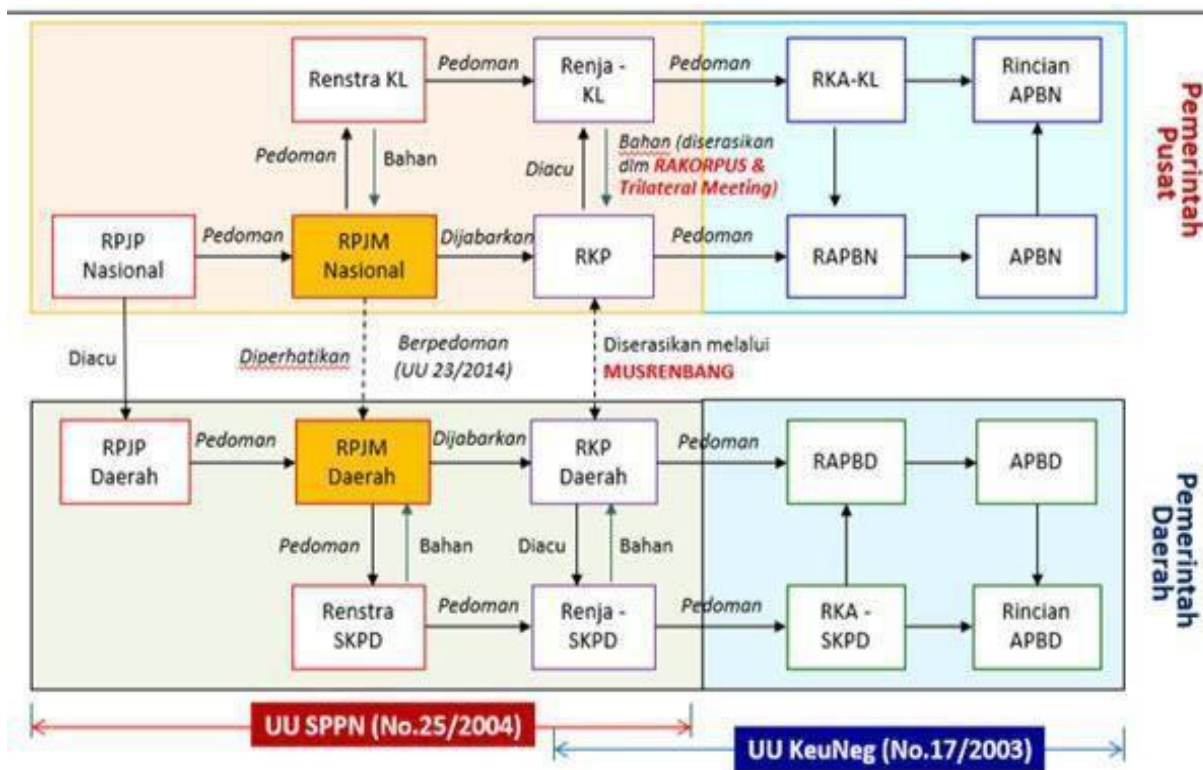
Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan

Dinas Kebudayaan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra perangkat daerah, dengan Renja K/L serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD dapat dilihat pada diagram berikut :

Gambar 1.2 Diagram Keterkaitan Dokumen



Penyusunan Renja **Dinas Kebudayaan** dari rancangan awal renja sampai rancangan akhir renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu renstra **Dinas Kebudayaan**, rancangan awal RKPD, dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan berpedoman pada:

1. Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja

Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappedalitbang Provinsi Riau untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penerapan Muatan Budaya Melayu Riau Di Ruang Umum;
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;

28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
30. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 856/X/2018 tentang Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 ini adalah dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2025-2026 yang meliputi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Riau
3. Sebagai bahan masukan program/kegiatan yang ada ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah:

1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah

dengan Renstra Perangkat Daerah

2. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra perangkat Daerah;
3. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau;
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja terdiri dari 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

2.6 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan serta Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian terkait program dan kegiatan/sub kegiatan serta pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila adanya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2023 dan perkiraan capaiannya ditahun 2024 serta capaian Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2024 Triwulan II, sesuai dengan tabel T-C.29 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	10 Dokumen	150,00%
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	15 Dokumen	150,00%
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	48 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	48 Laporan	100,00%
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	352 Orang/Bulan	264 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan	100,00%	88 Orang/Bulan	440 Orang/Bulan	125,00%
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Laporan Administrasi Umum yang dipenuhi	20 Laporan	10 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5 Laporan	20 Laporan	100,00%
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	32 Paket	14 Paket	8 Paket	8 Paket	100,00%	8 Paket	30 Paket	94,75%
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	64 Paket	50 Paket	16 Paket	16 Paket	100,00%	16 Paket	82 Paket	128,13%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	16.400 Paket	12.790 Paket	4000 Paket	4000 Paket	100,00%	4000 Paket	20.790 Paket	126,77%
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	20 Paket	8 Paket	8 Paket	100,00%	8 Paket	36 Paket	112,50%
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 Laporan	96 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100,00%	17 Laporan	130 Laporan	191,18%
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	16 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100,00%	4 Jenis	16 Jenis	100,00%
2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Paket	0 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00%	-	1 Paket	100,00%
2.22.01.1.07.00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	61 Unit	34 Unit	12 Unit	12 Unit	100,00%	12 Unit	58 Unit	95,08%
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	12 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100,00%	3 Jenis	12 Jenis	100%
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	48 Laporan	100,00%
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	48 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	60 Laporan	125,00%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	75,00%	3 Jenis	12 Jenis	100,00%
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33 Unit	24 Unit	8 Unit	8 Unit	100,00%	8 Unit	40 Unit	121,21%
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	1 Unit	4 Unit	100,00%
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	436 Unit	206 Unit	100 Unit	100 Unit	100,00%	100 Unit	406 Unit	93,12%
2.22.01.1.09.00011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	11 Unit	6 Unit	5 Unit/	5 Unit	100,00%	2 Unit	13 Unit	118,18%
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah data OPK yang dilindungi dan dikembangkan	284 OPK	122 OPK	76 OPK	76 OPK	100,00%	86 OPK	284 OPK	100,00%
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,21%	2,15%	2,18%	2,18%	100,00%	2,21%	2,21%	100,00%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.02.1.01.0001	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	10 Objek	6 Objek	9 Objek	9 Objek	100,00%	10 Objek	25 Objek	250,00%
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1762 Orang	191 Orang	1000 Orang	1000 Orang	100,00%	600 Orang	1791 Orang	101,65%
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana taman Budaya yang disediakan dan dipelihara	4 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00%	2 Unit	4 Unit	100,00%
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,21%	2,15%	2,18%	2,18%	100,00%	2,21%	2,21%	100,00%
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	64 Objek	48 Objek	16 Objek	16 Objek	100,00%	16 Objek	80 Objek	125,00%
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	54 Sertifikat	12 Sertifikat	15 Sertifikat	15 Sertifikat	100,00%	15 Sertifikat	42 Sertifikat	77,78%
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang di bina	5 Lembaga	1 Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%	2 Lembaga	5 Lembaga	100,00%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	5 Objek	2 Objek	1 Objek	1 Objek	100,00%	2 Objek	5 Objek	100,00%
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dikembangkan	2,21%	2,15%	2,18%	2,18%	100,00%	2,21%	2,21%	100,00%
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/Kota	Persentase pembinaan kesenian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	100,00%	12 Lembaga	36 Lembaga	60,00%
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	146 Cagar Budaya	116 Cagar Budaya	131 Cagar Budaya	131 Cagar Budaya	100,00%	146 Cagar Budaya	146 Cagar Budaya	100,00%
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100,00%	5,00%	20,00%	100,00%
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	210 Objek	45 Objek	45 Objek	45 Objek	100,00%	45 Objek	135 Objek	64,29%
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	70 Objek	15 Objek	20 Objek	20 Objek	100,00%	20 Objek	55 Objek	78,57%
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	8 Objek	4 Objek	2 Objek	2 Objek	100,00%	2 Objek	8 Objek	100,00%
2.22.05.1.02.0001	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	6 Objek	0 Objek	2 Objek	2 Objek	100,00%	2 Objek	4 Objek	66,67%
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan	9 Objek	2 Objek	3 Objek	3 Objek	100,00%	2 Objek	7 Objek	77,78%

Kodefikasi	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang	10 Orang	11 Orang	11 Orang	100,00%	11 Orang	32 Orang	80,00%
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum	85	65	75	75	100,00%	85	85	100,00%
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum	B	C	B	B	100,00%	B	B	100,00%
2.22.06.1.01.0001	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	2850 Unit	850 Unit	450 Unit	450 Unit	100,00%	450 Unit	1750 Unit	61,40%
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan mutu dan kapasitas Sumber daya Manusia permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	20 Orang	0 Orang	10 Orang	10 Orang	100,00%	10 Orang	20 Orang	100,00%
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	300,00%
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	2 Unit	200,00%
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	2 Unit	200,00%

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2023 terdapat 1 sub kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Dinas Kebudayaan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 1 Unit terealisasi 0 Unit dengan tingkat capaian realisasi 0%. Perkiraan sampai dengan Tahun 2024 tingkat capaian realisasi target perubahan renstra sebesar 100%.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Tahun 2023 berdasarkan matrik hasil evaluasi renja, terdapat 5 program yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Tidak terdapat perubahan target pada Renja dan Perubahan Renja 2023. Indikator program ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan dengan target 100%, terealisasi 100%, capaian 100% dan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 14 sub kegiatan, Adapun uraian capaian kinerja masing-masing sub kegiatan dapat disajikan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah 5 Dokumen terealisasi 5 Dokumen atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 150%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88 Orang terealisasi 88 Orang atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 125%.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 8 paket terealisasi 8 paket atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 93,75%.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 16 paket terealisasi 16 paket atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 128,13%.

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 4000 paket terealisasi 4000 paket atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 126,77%.
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 8 paket terealisasi 8 paket atau 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 laporan terealisasi 17 laporan atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 191,18%.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Mebel, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Paket mebel yang Disediakan 1 Paket terealisasi 1 Paket atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.
 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 unit terealisasi 12 unit atau sebesar

100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 95,08%.

- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Laporan terealisasi 12 Laporan atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 laporan terealisasi 12 laporan atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 125%.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Kendaraan Dinas Jabatan, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 8 unit terealisasi 8 unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 121,21%.
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 unit terealisasi 100 unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 93,12%.

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi 5 unit terealisasi 5 unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 118,18%.

b. Program Pengembangan kebudayaan

Tidak terdapat perubahan target pada Renja dan Perubahan Renja 2023. Indikator program ini adalah Jumlah data OPK yang dilindungi dan dikembangkan dengan target 76 OPK, terealisasi 76 OPK, capaian 100% dan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, uraian capaian kinerja masing-masing sub kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 1. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan 9 objek terealisasi 9 objek atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra

sebesar 250%.

2. Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1000 orang terealisasi 1000 orang atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 101,65%.
 3. Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana taman Budaya yang disediakan dan dipelihara 2 Unit terealisasi 2 Unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.
- 2) Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 16 objek terealisasi 16 objek atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 125%.
 2. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 15 sertifikat terealisasi 15 sertifikat atau

sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 77,78%.

3) Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi

1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 1 objek terealisasi 1 objek atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.

c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Tidak terdapat perubahan target pada Renja dan Perubahan Renja 2023. Indikator program ini adalah Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan dengan target 2,18% terealisasi 2,18% capaian 100% dan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, uraian capaian kinerja masing-masing sub kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab/ Kota
 1. Peningkatan kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional; tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 lembaga terealisasi 12 lembaga atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 60%.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Tidak Terdapat perubahan target pada Renja dan Perubahan Renja 2023. Indikator program ini Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi dengan target 131 Cagar Budaya terealisasi 131 Cagar Budaya capaian 100% dan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan, uraian capaian kinerja sebagai berikut :

1) Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

1. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 45 objek terealisasi 45 objek atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 64,29%.
2. Penetapan Cagar Budaya; tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan 20 objek terealisasi 20 objek atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 78,57%.

2) Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi

1. Perlindungan Cagar Budaya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Objek Cagar Budaya yang diregistrasi 2 objek terealisasi 2 objek atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 66,67%.
2. Pengembangan Cagar Budaya, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Objek Cagar Budaya yang dikembangkan 3 objek terealisasi 3 objek atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan

Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 77,78%.

3. Pembinaan Dan peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya; tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 11 orang terealisasi 11 orang atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 80%.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Tidak Terdapat perubahan target pada Renja dan Perubahan Renja 2023. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum dengan target 75% terealisasi 75% capaian 100% dan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, Adapun uraian capaian kinerja masing-masing sub kegiatan dapat disajikan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi

1. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan 450 Unit terealisasi 450 Unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 61,40%.
2. Pembinaan dan Peningkatan mutu dan kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Sumber Daya Manusia permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya 10 Orang terealisasi 10 Orang atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun

2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 100%.

3. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum. Indikator Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum 1 Unit terealisasi 1 Unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 300%.
4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia 1 Unit terealisasi 1 Unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 200%.
5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum, tidak terdapat perubahan target setelah perubahan. Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi 1 Unit terealisasi 1 Unit atau sebesar 100% dengan perkiraan sampai dengan Tahun 2024 Tingkat Capaian Realisasi Target Perubahan Renstra sebesar 200%.

2.1.3. Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2023 berdasarkan matrik hasil evaluasi renja, tidak terdapat Program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.

Pada Tahun 2023 berdasarkan matrik hasil evaluasi renja, terdapat sub kegiatan yang tidak tercapai kinerjanya. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tidak

dilaksanakan dikarenakan komponen dari alat yang di butuhkan tidak tersedia.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dari gambaran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024, telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dimana berdasarkan indikator kegiatan telah ditetapkan target kinerja OPD dalam kerangka pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya indikator yang tidak tercapai pada tahun anggaran yang telah ditetapkan menimbulkan implikasi perlambatan dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dan kedepan diharapkan adanya inovasi percepatan dalam pencapaian terget kinerja tersebut dengan dukungan pengambil kebijakan serta mencermati kembali sebagai masukan dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyesuaian terhadap perencanaan dan penganggaran berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi Riau, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengantisipasi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Perlunya koordinasi dengan berbagai pihak baik dengan instansi pemerintah, kabupaten/kota maupun masyarakat mengingat luasnya ruang lingkup pemajuan kebudayaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Subbab Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ini berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

Indikator Kinerja Utama. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tabel T-C.30 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

No	Indikator	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau (Persen)			36,36	45,45	54,54	63,63	36,36	-	54,54	63,63	
2	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dilindungi (Persen)			78,30	80,40	82,50	84,60	79,74	-	82,50	84,60	
3	Persentase Budaya Melayu Riau yang Dikembangkan (Persen)			8,00	10,00	12,00	14,00	6,35	-	12,00	14,00	
4	Nilai Ekspresi Budaya (Nilai)			-	-	47,69	49,18	-	-	47,69	49,18	
5	Nilai Warisan Budaya (Nilai)			-	-	57,40	58,90	-	-	57,40	58,90	

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana Tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan

Untuk indikator tujuan Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau dengan target tahun 2023 sebesar 36,36% terealisasi sebesar 36,36%, untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 45,45% sampai dengan triwulan II terealisasi 36,36%, sedangkan untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar 54,54% dan tahun 2026 diproyeksikan sebesar 63,63%.

2. Indikator Sasaran

- a. Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi dengan target tahun 2023 sebesar 78,30% terealisasi sebesar 79,74%, untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 80,40%

sampai dengan triwulan II terealisasi 79,74%, sedangkan untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar 82,50% dan tahun 2026 diproyeksikan sebesar 84,60%.

- b. Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan dengan target tahun 2023 sebesar 8,00% terealisasi sebesar 6,35%, untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 10,00% sampai dengan triwulan II terealisasi 6,35%, sedangkan untuk tahun 2025 diproyeksikan sebesar 12,00 % dan tahun 2026 diproyeksikan sebesar 14,00%.
- c. Nilai Ekspresi Budaya pada tahun 2023 dan tahun 2024 belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak ditetapkan target. Untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 47,69% dan tahun 2026 ditargetkan sebesar 49,18%.
- d. Nilai Warisan Budaya pada tahun 2023 dan tahun 2024 belum menjadi indikator kinerja sehingga tidak ditetapkan target. Untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 57,40% dan tahun 2026 ditargetkan sebesar 58,90%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilaksanakan melalui pendekatan strategi dan kebijakan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah salah satu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan di

berbagai bidang, dan dalam rangka mendukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Isu-isu strategis gender dalam Pembangunan Kebudayaan adalah :

1. Peningkatan fasilitas pendukung terkait penyediaan Sarana dan Prasarana untuk penyandang Disabilitas di Lingkunga Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
2. Peningkatan akses masyarakat dari semua kalangan terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan dan objek pemajuan kebudayaan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan konsekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Urusan Kebudayaan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel 2.3
Realisasi Pemajuan Budaya Melayu Riau

No	Indikator	Target (%)				Realisasi Tahun (%)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	9,09	18,18	27,27	36,36	9,09	18,18	27,27	36,36

Capaian persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau merupakan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang telah diubah sejak tahun 2020 menyesuaikan

dengan Perubahan RPJMD Provinsi Riau periode 2019-2024. Adapun capaian persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau pada tahun 2020 hingga tahun 2023 mencapai tingkat capaian 100% dari target yang dicanangkan. Adapun tingkat capaian Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau didukung pada capaian persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi, persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan, dan persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan.

1. Realisasi Budaya Melayu Riau yang dilindungi

No	Indikator	Target (%)				Realisasi Tahun (%)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	70,00	74,10	76,20	78,30	70,02	71,08	72,02	79,74

Pencapaian persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi pada tahun 2020 mencapai tingkat keberhasilan hingga 100,03% dari target yang dicanangkan sebesar 70,00%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan capaian tingkat keberhasilan menjadi 95,92% dari target sebesar 74,10% dan 94,51% dari target sebesar 76,20%. Pada tahun 2023 mencapai tingkat keberhasilan hingga 101,84% dari target 78,30% dengan realisasi 79,74%. Kondisi ini menunjukkan terjadi kenaikan upaya dalam perlindungan Budaya Melayu Riau dalam pencatatan, penetapan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Hal ini disebabkan tingkat partisipasi Kabupaten/Kota dalam upaya perlindungan Budaya Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang di 12 Kabupaten/Kota sudah ada.

2. Realisasi Budaya Melayu Riau yang dikembangkan

No	Indikator	Target (%)				Realisasi Tahun (%)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	2,00	4,00	6,00	8,00	1,60	4,96	5,22	6,35

Pencapaian persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan pada tahun 2020 mencapai tingkat keberhasilan 80,00% dari target yang dicanangkan sebesar 2,00%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan capaian tingkat keberhasilan hingga sebesar 124,02% dari target yang dicanangkan sebesar 4,00%. Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan capaian menjadi 87,05% dan 79,38% dari target yang dicanangkan sebesar 6,00% dan 8,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan upaya pengembangan Budaya Melayu Riau dalam penelitian, penyebarluasan dan pengayaan keragaman. Hal ini disebabkan kurangnya tingkat partisipasi Kabupaten/Kota dalam upaya pengembangan Budaya Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang di 12 Kabupaten/Kota.

3. Realisasi Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan

No	Indikator	Target (%)				Realisasi Tahun (%)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan	2,00	3,00	4,00	5,00	1,40	2,05	2,15	5,25

Pencapaian persentase Budaya Melayu Riau yang dimanfaatkan pada tahun 2020 mencapai tingkat keberhasilan 70,00% dari target yang dicanangkan sebesar 2,00%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan capaian menjadi 68,33% dari target yang dicanangkan sebesar 3,00% dan 53,75% dari target yang dicanangkan sebesar 4,00%. Tahun 2023 mencapai tingkat keberhasilan 105,00% dari target yang dicanangkan sebesar 5,00% dengan realisasi 5,25%. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan upaya pemanfaatan Budaya Melayu Riau dalam inovasi, diplomasi, dan kerjasama budaya. Hal ini disebabkan tingkat partisipasi Kabupaten/Kota dalam upaya pemanfaatan Budaya Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang di 12 Kabupaten/Kota sudah ada.

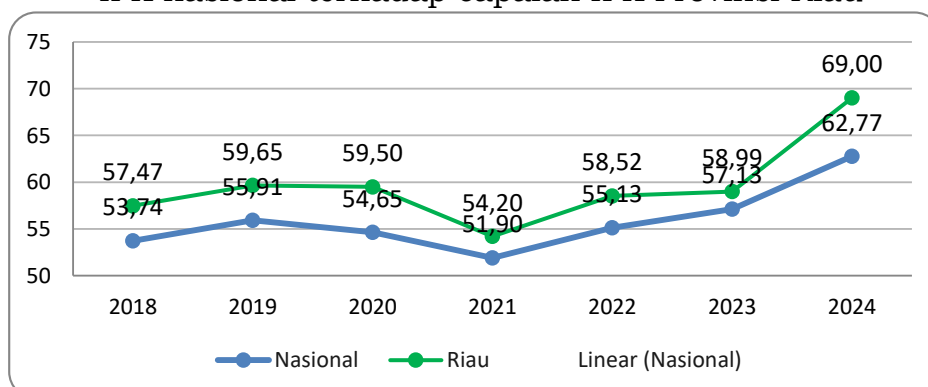
Selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 856/X/2018 tentang pokok-pokok Pikiran Kebudayaan daerah Provinsi Riau bahwa dari 11 (sebelas) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) terdapat 3.270 Data OPK, perkembangan Data OPK sampai dengan 2023 disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
Data Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2018 – 2023

No	Obyek Pemajuan Kebudayaan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tradisi Lisan	158	158	160	305	240	429
2	Manuskrip	41	41	43	73	94	94
3	Adat Istiadat	65	65	65	146	191	212
4	Ritus	273	273	273	385	431	431
5	Pengetahuan Tradisional	385	385	385	844	995	996
6	Teknologi Tradisional	189	189	189	403	506	507
7	Seni	370	370	370	538	588	600
8	Bahasa	74	74	74	74	128	128
9	Permainan Rakyat	219	219	219	255	273	283
10	Olahraga Tradisional	44	44	44	68	86	88
11	Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi	1.452	1.482	1.988	1988	2424	2489
Jumlah		3.270	3.300	3.810	5.079	6.136	6.257

Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) yang merupakan pengukuran kinerja Urusan Kebudayaan secara nasional. Capaian IPK Provinsi Riau cukup baik, dari tahun 2018 sd 2023 capaiannya di atas rata-rata capaian nasional, berikut digambarkan capaian IPK Nasional dan Provinsi Riau serta capaian per dimensinya.

Gambar 2.1
IPK nasional terhadap capaian IPK Provinsi Riau



Sumber Data : Kemendikbudristek Tahun 2024

Tabel 2.5
Capaian Provinsi Riau terkait 7 dimensi

No.	Dimensi	Bobot Dimensi	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
D1	Ekonomi Budaya	0,10	45,76	48,32	42,45	26,35	39,34	30,73
D2	Pendidikan	0,20	72,63	77,23	75,29	74,27	76,22	78,03
D3	Ketahanan Sosial Budaya	0,20	74,84	75,41	75,64	70,07	73,88	75,30
D4	Warisan Budaya	0,25	44,03	45,91	48,00	47,47	51,75	53,02
D5	Ekspresi Budaya	0,10	35,10	36,13	36,05	22,31	25,39	26,54 / 34,91
D6	Budaya Literasi	0,10	58,20	61,90	65,25	56,39	61,92	63,46
D7	Gender	0,05	61,14	60,24	58,82	59,20	57,91	60,03
IPK Provinsi Riau			57,47	59,65	59,50	54,20	58,52	58,99
IPK Nasional			53,74	55,91	54,65	51,90	55,13	57,13

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudristek RI

Memasuki periode Pasca Pandemi, skor IPK Riau mengalami perbaikan. Skor IPK berhasil meningkat dari tahun 2021 sebesar 54,20 menjadi 58,99 pada tahun 2023, diiringi dengan meningkatnya seluruh dimensi pembentuk. Dimensi yang mengalami peningkatan paling besar, yaitu Dimensi Budaya Literasi skor 56,39 pada tahun 2021 menjadi 63,46 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 7,07 poin, sedangkan Dimensi yang mengalami peningkatan paling kecil yaitu Dimensi Gender dengan skor pada tahun 2021 sebesar 59,20 menjadi 60,03 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,83 poin.

Tabel 2.6
Peringkat IPK Provinsi Riau 2018 – 2023

Tahun	IPK		Peringkat Nasional	Peringkat Sumatera
	Nasional	Riau		
2018	53,74	57,47	7	
2019	55,91	59,65	7	
2020	54,65	59,50	4	1
2021	51,90	54,20	8	2
2022	55,13	58,52	4	1
2023	57,13	58,99	10	4

Sumber Data : Kemendikbudristek Tahun 2024

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Permasalahan yang dihadapi bidang kebudayaan adalah belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan hal ini disebabkan karena :

1. Belum optimalnya Perlindungan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.
2. Belum optimalnya Pengembangan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.
3. Belum optimalnya Pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tersebut adalah:

- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi, serta belum optimalnya kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang kebudayaan;
- d. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan;

2.3.3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional dan Sustainable Development Goals (SDGs)

2.3.3.1. Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah

Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau, disesuaikan untuk menyelaraskan dimensi waktu dengan visi pembangunan jangka panjang Nasional dan dimensi tempat dengan memperhatikan perkembangan terkini, sehingga visi jangka panjang pembangunan Riau 2025 dirumuskan sebagai berikut: **“Terwujudnya Provinsi Riau**

sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”

Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2025 melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian;
2. Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing;
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah;
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah;
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah;
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal;
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera;
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan;
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak;
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari;
12. Mewujudkan masyarakat madani.

Tujuan dan Sasaran Daerah yang tertuang dalam RPD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 yang terkait dengan kebudayaan adalah Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Melayu dengan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan. Sasarannya adalah Meningkatnya Ketahanan Kebudayaan Melayu dengan Indikator Persentase Pemajuan

Budaya Melayu Riau dan Meningkatnya Ekspresi Dan Warisan Budaya Melayu dengan Indikator Nilai Ekspresi Budaya dan Nilai Warisan Budaya.

2.3.3.2. Terhadap Pencapaian Program Nasional

Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam lingkup nasional sejalan dengan visi dan misi Kemendikbudristek khususnya Dirjen Kebudayaan. Dari hasil pembahasan dan kesepakatan dalam berita acara hasil pembahasan desk urusan pemerintahan bidang kebudayaan koordinasi teknis perencanaan pembangunan Tahun 2025 antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sudah menyepakati hasil pembahasan out come prioritas nasional dengan melakukan penyelarasan target dan indikator untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun perhitungan capaian indikator dan target tetap dilakukan oleh kemendikbudristek sesuai dengan masing masing dimensi dari indeks pemajuan kebudayaan.

- Terhadap Pencapaian SDGs

Preservasi merupakan upaya untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun kecelakaan sehingga membahayakan warisan budaya dan alam yang dijaga maupun sekitarnya. Perlindungan merupakan proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak, hilang maupun hancur. Konservasi warisan budaya berbeda dengan konservasi warisan alam. Konservasi warisan budaya merupakan langkah yang diambil untuk memperpanjang usia warisan budaya tertentu yang sinergis dengan upaya untuk memperkuat penyebaran nilai dan pesan budaya tersebut.

Sementara konservasi warisan alam merupakan langkah untuk melindungi, menjaga, mengelola dan merawat ekosistem, habitat, flora dan fauna langka, masyarakat adat, baik di dalam maupun di luar lingkungan aslinya untuk menjaga keberadaannya dalam jangka waktu panjang.

Warisan budaya terdiri atas warisan budaya benda (tangible) dan warisan budaya tak benda (*intangible*). Di Indonesia, warisan budaya benda ini sering pula disebut dengan cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang berlokasi di darat maupun perairan serta perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan (UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Warisan alam adalah bentukan dan kawasan alam, geologi atau fisik-geografis yang menjadi habitat satwa dan tanaman yang hampir punah, serta lokasi alam yang memiliki nilai pendidikan, konservasi atau keindahan alam. Warisan alam ini termasuk taman dan hutan lindung, kebun binatang, akuarium dan kebun raya (UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972). Selain itu, terdapat pula warisan campuran dimana suatu situs memiliki warisan budaya dan alam dalam satu lokasi. Namun, indikator ini juga belum tersedia sehingga data belum dapat disajikan.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan kebudayaan diwujudkan melalui penegakan, penguatan dan pengembangan 7 (tujuh) pilar yaitu (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Keberhasilan pembangunan kebudayaan juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan fasilitas informasi dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Dalam melakukan pemajuan kebudayaan Melayu khususnya di Provinsi Riau, sebagaimana dalam memajukan kebudayaan lainnya, permasalahan tentu tidak bisa dihindari. Jika melihat kondisi dan sekaligus posisi Provinsi Riau maka terdapat beberapa tantangan yang saat ini menjadi permasalahan dalam memajukan kebudayaan melayu. Diantara tantangan tersebut Antara lain :

- a. Pengaruh budaya global yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi (TI) yang dapat menyebabkan menurunnya pengamalan adat istiadat Melayu, dan perubahan sifat dan perilaku generasi muda;
- b. Nilai-nilai luhur dalam budaya Melayu semakin tidak dikenal oleh masyarakat terutama generasi muda;
- c. Kerjasama antara pelaku seni budaya dan insan budaya dengan pemerintah belum terpadu, sehingga upaya pelestarian dan pemanfaatan seni budaya dalam diplomasi budaya, kunjungan kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
- d. Terbatasnya dokumentasi, kajian sejarah lokal, kelengkapan data kebudayaan dan tradisi baik yang bersifat warisan budaya, situs dan warisan budaya tak benda, sehingga apresiasi budaya dalam masyarakat belum optimal;

Tujuan pembangunan kebudayaan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi kebudayaan, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan.

Dalam meningkatkan pelayanan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dihadapkan kepada peluang dan tantangan. Adapun peluang-peluangnya antara lain :

1. Potensi keanekaragaman warisan dan kekayaan kebudayaan

yang dimiliki;

2. Tingkat keanekaragaman cagar budaya yang tinggi baik yang berasal dari kelompok masyarakat maupun keanekaragaman dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern dan kewilayahan;
3. Jumlah pengunjung museum yang meningkat;
4. Perkembangan kesenian dalam kehidupan masyarakat meningkat baik seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni musik dan seni media rekam dan film serta seni desain;
5. Potensi nilai budaya di Provinsi Riau sangat tinggi ;
6. Dukungan pemerintah dalam pengembangan nilai-nilai budaya di Provinsi Riau;

2.3.5. Formulasi Isu-isu Penting

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan kebudayaan yang dihadapi Indonesia pada umumnya dan Riau pada khususnya, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu strategis pembangunan kebudayaan di Provinsi Riau melalui berbagai pertimbangan, antara lain: (1) memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran, (2) luasnya dampak yang ditimbulkan, (3) memiliki daya ungkit terhadap pembangunan kebudayaan, (4) kemudahan untuk dikelola.

Berdasarkan hal tersebut, maka rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 dan merupakan isu – isu strategis/penting tersebut meliputi 1 aspek isu yaitu :

1. Kelestarian Budaya. Isu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
 - 2) Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan

- objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
- 3) Peningkatan penyebaran, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Riau;
 - 4) Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi;
 - 5) Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Riau;
 - 6) Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - 7) Mengoptimalkan aspek ekonomi kebudayaan dalam Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan maksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja pencapaian target yang ada dan telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Selain itu review ini didasarkan pada tingkat kinerja yang dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan/sub kegiatan dan pagu indikatif untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan rancangan awal RKPD.

Proses yang dilakukan dalam review ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi prioritas program dan kegiatan/sub kegiatan yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD
2. Menentukan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan cara membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan hasil analisis yang dilakukan pada tahap - tahap sebelumnya.
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada garis yang sama.

4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan/sub kegiatan prioritas telah termuat dalam rancangan awal RKPD atau belum.
5. Identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan yang sesuai dan tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
6. Menentukan program dan kegiatan/sub kegiatan lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/ kegiatan /sub kegiatan dan pagu indikatif/besaran dana yang dibutuhkan dan dialokasikan untuk setiap program/kegiatan/sub kegiatan.

Hasil proses review terhadap rancangan awal RKPD secara lengkap sesuai dengan Tabel.T-C.31 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.7 (Tabel.T-C.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI RIAU

DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				42.261.600.780,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				55.761.600.780,00	
	DINAS KEBUDAYAAN				36.611.600.780,00	DINAS KEBUDAYAAN				37.711.600.780,00	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan	100%	24.284.872.244,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan	100%	24.534.872.244,00	
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	254.669.110,00	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	254.669.110,00	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	254.669.110,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	254.669.110,00	
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	12 Laporan	15.465.761.271,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	12 Laporan	15.715.761.271,00	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	15.465.761.271,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/ Bulan	15.715.761.271,00	Penambahan target dan anggaran terkait Jumlah Tenaga PPPK dan Penetapan Ketua Tim Bidang PANB dan SPCB
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Jenis	48.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	1 Jenis	48.000.000,00	
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	48.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	48.000.000,00	
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	5 Jenis layanan	902.667.512,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	5 Jenis layanan	902.667.512,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	54.669.110,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	54.669.110,00	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	328.492.124,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	328.492.124,00	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4000 Paket	86.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4000 Paket	86.000.000,00	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	102.256.278,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	102.256.278,00	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	331.250.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	331.250.000,00	
13	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	213.230.211,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	3 Jenis Barang	213.230.211,00	
14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	105.230.211,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	105.230.211,00	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	108.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	108.000.000,00	
16	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	2 Jenis	4.583.052.380,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	2 Jenis	4.583.052.380,00	
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	523.880.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	523.880.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.059.172.380,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.059.172.380,00	
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	2.817.491.760,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis	2.817.491.760,00	
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	116.861.760,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	116.861.760,00	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	94.150.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	94.150.000,00	
23	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	2.556.480.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 Unit	2.556.480.000,00	
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	96 Data OPK	8.796.964.958,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	96 Data OPK	9.046.964.958,00	
24	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,24 %	2.327.911.727,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27%	2.777.911.727,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	10 Objek	1.247.386.722,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	10 Objek	1.497.386.722,00	Adanya penyesuaian harga
26	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	1.080.525.005,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	500 Orang	1.080.525.005,00	
27	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,24 %	1.469.053.231,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi		Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,27%	1.469.053.231,00	
28	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.165.414.499,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.165.414.499,00	
29	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	303.638.732,00	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	12 Sertifikat	303.638.732,00	
30	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang di bina	1 Lembaga	5.000.000.000,00	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang di bina	1 Lembaga	5.000.000.000,00	
31	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	5.000.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek	5.000.000.000,00	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	2,21%	285.729.919,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	2,21%	285.729.919,00	
32	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pembinaan Kesenian	100%	285.729.919,00	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pembinaan Kesenian	100%	285.729.919,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	150.000.000,00	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	10 Sertifikat	150.000.000,00	
34	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	135.729.919,00	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	135.729.919,00	
IV	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Sejarah yang dibina	50 Objek	459.056.773,00	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah Sejarah yang dibina	50 Objek	459.056.773,00	
35	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	12 Kab/Kota	459.056.773,00	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	12 Kab/Kota	459.056.773,00	
36	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10 Orang	100.000.000,00	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	10 Orang	100.000.000,00	
37	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	126.768.773,00	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	126.768.773,00	
38	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	232.288.000,00	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	232.288.000,00	
V	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah cagar budaya yang dilindungi	146 Objek	2.784.976.886,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Jumlah cagar budaya yang dilindungi	146 Objek	2.784.976.886,00	
39	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	5%	436.958.744,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	5%	436.958.744,00	
40	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	150.000.000,00	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	20 Objek	150.000.000,00	
41	Penetapan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	286.958.744,00	Penetapan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	15 Objek	286.958.744,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	2 Objek	2.300.000.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	2 Objek	2.300.000.000,00	
43	Pelindungan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	1.100.000.000,00	Pelindungan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	1.100.000.000,00	
44	Pengembangan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	800.000.000,00	Pengembangan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	800.000.000,00	
45	Pemanfaatan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	200.000.000,00	Pemanfaatan Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	200.000.000,00	
46	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	200.000.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	200.000.000,00	
47	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang terbit izin membawa ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	48.018.142,00	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi		Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang terbit izin membawa ke Luar Daerah Provinsi	2 Objek	48.018.142,00	
48	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	48.018.142,00	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	1 Laporan	48.018.142,00	
	UPT MUSEUM SANGNILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA				5.650.000.000,00	UPT MUSEUM SANGNILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA				18.650.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	96 Data OPK	2.500.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan	96 Data OPK	15.500.000.000,00	
49	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,24%	2.500.000.000,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27%	15.500.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	4 Objek	1.500.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	4 Objek	1.500.000.000,00	Termasuk DAK
51	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	500.000.000,00	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200 Orang	500.000.000,00	Termasuk DAK
52	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit	500.000.000,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit	13.500.000.000,00	- Termasuk DAK - Revitalisasi GOS
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum	85	3.150.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum	85	3.150.000.000,00	
53	Pengelolaan Museum Provinsi		Nilai Akreditasi Museum	B	3.150.000.000,00	Pengelolaan Museum Provinsi		Nilai Akreditasi Museum	A	3.150.000.000,00	
54	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	5 Unit	750.000.000,00	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	5 Unit	750.000.000,00	Termasuk DAK
55	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	150.000.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	150.000.000,00	Termasuk DAK
56	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1.550.000.000,00	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1.550.000.000,00	Termasuk DAK
57	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	200.000.000,00	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	200.000.000,00	
58	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	500.000.000,00	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Kota Pekanbaru, Marpoan Damai, Tangkerang Tengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	500.000.000,00	
TOTAL					42.261.600.780					55.761.600.780,00	

Pada Tabel 2.7 bisa kita lihat bahwa ada penambahan Anggaran dari tahap Rancangan Awal RKPD sesuai dengan Analisis Kebutuhan Belanja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Dalam hal penambahan Anggaran diperlukan untuk memaksimalkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau untuk mencapai hasil Kinerja lebih maksimal. Penambahan anggaran di fokuskan untuk menunjang Kebutuhan Belanja Pegawai khususnya di Tambahan Penghasilan dan Penambahan Pegawai PPPK serta kegiatan yang berkaitan dengan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. Untuk UPT. Museum dan Taman Budaya, penambahan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan menambah Sarana dan Prasarana yang ada dilingkungan UPT. Museum dan Taman Budaya, hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan mencapai Tujuan ke 2 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Kebudayaan Melayu” .

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan rencana kerja Tahun 2025 Dinas Kebudayaan Provinsi Riau melakukan penelaahan terhadap program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, baik program dan kegiatan/sub kegiatan yang langsung disampaikan dan ditujukan ke Dinas Kebudayaan Provinsi Riau maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

Penjelasan kesesuaian usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Pada dasarnya usulan tersebut sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, sehingga dapat diterima sebagai usulan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menurut Tabel T-C.32. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel 2.8 sebagai berikut :

Tabel 2.8 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pemerintah Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Pengembangan dan Perlombaan Festival Tamaddun Melayu (Rarak Godang)
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Desa Pematang Kecamatan Pangean, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Paket	
2	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Penyelenggaraan Event Budaya Daerah (Festival Zikir Burdah/Zikir Dontuang Masyarakat Cerenti Kuansing)
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Balai Adat Cerenti Kec. Cerenti, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Paket	

3	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Penyelenggaraan Festival Tamadun Melayu/Festival Gondang Bergong Se-Rokan Hulu
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Rokan Hulu, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1 Paket	
4	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Kebudayaan Provinsi Riau
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kabupaten / Kota se - Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	37 Terbit	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran bidang kebudayaan		Bangunan dalam Kawasan UPT. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pekanbaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Paket	

6	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Pembangunan Rumah Adat
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang dibina		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kecamatan Kabun, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Paket	
7	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Pembangunan Rumah Adat Pagaran Tapah
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang dibina		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kecamatan Pagaran Tapah, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Paket	
8	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Pembangunan Rumah Adat
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang dibina		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kecamatan Pendalian, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Paket	

9	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Pembangunan Rumah Adat LKA Kepenuhan Hulu
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Lembaga Adat yang dibina		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kepenuhan Hulu, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Paket	
10	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Produksi dan Penayangan Profil Museum Daerah Riau Sang Nila Utama di TV Streaming
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	40 Tayang	
11	Program Pengembangan Kebudayaan		Jumlah Data OPK yang dilindungi dan dikembangkan		Produksi dan Penayangan Profil Museum Daerah Riau Sang Nila Utama di TV Streaming
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	40 Tayang	

2.6 Kelompok Sasaran layanan

Adapun kelompok sasaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau periode 2025 – 2026 adalah :

1. Lembaga Adat Melayu Riau
2. Dewan Kesenian Riau
3. Lembaga Kebudayaan Tingkat Provinsi
4. Sanggar Kesenian
5. Pelaku Budaya
6. Pelaku Kesenian
7. Dinas terkait Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025 merupakan gerbang awal menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita luhur untuk membangun bangsa yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Salah satu tujuan utama pembangunan nasional yaitu mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengurangan kesenjangan antarwilayah, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini juga didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dalam membangun fondasi pemerataan kewilayahan, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis pulau melalui penyiapan tema pembangunan wilayah sesuai dengan keunggulan daerah. Pada Tabel 3.1 tentang Indikasi Intervensi Kebijakan Nasional dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikasi Intervensi Kebijakan Nasional

No	Prioritas Nasional	Highlight Indikasi Intervensi
1	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	• Pengembangan khazanah kebudayaan Melayu Riau melalui revitalisasi Cagar Budaya Istana Siak • Pembangunan pengaman pantai di pulau terluar • Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan • Prasarana pengaman pantai yang dibangun di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Tujuan dan Sasaran Daerah. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2025 – 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yaitu : “Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu”. Sedangkan Sasaran Dinas Kebudayaan yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya perlindungan dan pengembangan Budaya Melayu;
2. Meningkatnya ekspresi Budaya Melayu;
3. Meningkatnya warisan Budaya Melayu.

Dalam melaksanakan pengukuran ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai berdasarkan indikator dan target kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan Melayu		Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	54,54 %
		Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Budaya Melayu	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	82,50 %
			Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	12,00 %
		Meningkatnya Ekspresi Budaya Melayu	Nilai Ekspresi Budaya	47,69 nilai
		Meningkatnya Warisan Budaya Melayu	Nilai Warisan Budaya	57,40 nilai

3.3 Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau
- b. Pencapaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang Urusan Kebudayaan
- c. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing unit kerja bidang;
- d. Memperhatikan program Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- e. Mempertimbangkan hasil evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang.

Selanjutnya program dan kegiatan/sub kegiatan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diatas secara garis besar sebagai berikut :

- Jumlah program strategis sebanyak 5 program
- Jumlah kegiatan sebanyak 8 kegiatan
- Jumlah sub kegiatan sebanyak 21 sub kegiatan

Adapun kebutuhan pendanaan prioritas Urusan Kebudayaan pada Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 18.274.450.152,- (*delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah*), dengan rincian berdasarkan sumber dana sebagai berikut :

- PAD Provinsi sebesar Rp. 14.974.450.152,-
- DAK Non Fisik Sebesar Rp. 3.300.000.000,-

Rekapitulasi Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel.3.3 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.624.522.642,00				13.728.710.394,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan		96 Data OPK	9.142.778.091,00			106 Data OPK	9.246.964.958,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		2,24 %	2.603.989.042,00			2,27%	2.777.911.727,00
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	1.526.056.054,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Objek	1.497.386.722,00
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	1.077.932.988,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700 Orang	1.280.525.005,00
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional		2,24 %	1.538.789.049,00			2,27%	1.469.053.231,00
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Objek	1.165.414.208,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Objek	1.165.414.499,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.2.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Sertifikat	373.374.841,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Sertifikat	303.638.732,00
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang di bina		1 Lembaga	5.000.000.000,00			1 Lembaga	5.000.000.000,00
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	5.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Objek	5.000.000.000,00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan		2,21%	285.729.919,00			2,24%	1.285.729.919,00
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Kesenian		100%	285.729.919,00			100%	1.285.729.919,00
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Sertifikat	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Sertifikat	150.000.000,00
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Lembaga	135.729.919,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Lembaga	1.135.729.919,00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah yang dibina		50 Objek	459.056.387,00			50 Objek	459.056.773,00
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina		12 Kab/Kota	459.056.387,00			12 Kab/Kota	459.056.773,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	99.999.972,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang	150.000.000,00
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	126.768.415,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	156.768.773,00
2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	232.288.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	152.288.000,00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilindungi		146 Objek	2.736.958.245,00			156 Objek	2.736.958.744,00
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi		5%	436.958.540,00			5%	436.958.744,00
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Objek	149.999.860,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Objek	150.000.000,00
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Objek	286.958.680,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Objek	286.958.744,00
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola		2 Objek	2.299.999.705,00			2 Objek	2.300.000.000,00
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	1.100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Objek	1.100.000.000,00
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	800.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Objek	800.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Objek	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Objek	200.000.000,00
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	199.999.705,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Orang	200.000.000,00

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UPT MUSEUM SANGNILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA				5.649.927.510,00				5.800.000.000,00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilindungi dan dikembangkan		96 Data OPK	2.500.000.000,00			106 Data OPK	2.500.000.000,00
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola		2,24%	2.500.000.000,00			2,27%	2.500.000.000,00
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	4 Objek	1.500.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		11 Objek	1.500.000.000,00
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	200 Orang	500.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		700 Orang	500.000.000,00
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	1 Unit	500.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	500.000.000,00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Museum		85 Poin	3.149.927.510,00			90 Poin	3.300.000.000,00
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum		B Nilai	3.149.927.510,00			A Nilai	3.300.000.000,00
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	5 Unit	750.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Non Fisik-BOP Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya		5 Unit	750.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Pra Kiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	5 Orang	150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Orang	150.000.000,00
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.549.999.700,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Non Fisik-BOP Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya		1 Unit	1.600.000.000,00
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	1 Unit	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Non Fisik-BOP Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya		1 Unit	250.000.000,00
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	1 Unit	499.927.810,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Non Fisik-BOP Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya		1 Unit	550.000.000,00

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan pagu indikatif secara keseluruhan sebesar **Rp. 18.274.450.152,-** (*delapan belas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah*), dan jika pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan tanpa Non Urusan menjadi **Rp. 14.974.450.152,-** (*empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah*).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Tahun 2025 adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel dibawah berisi Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran pada dokumen Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 dan dokumen RPD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026.

Jumlah seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau di Tahun 2025 adalah sebanyak :

- a. Program Dinas Kebudayaan berjumlah 6 (enam) Program, terdiri dari :
 - 1 (satu) Program Penunjang Urusan
 - 5 (lima) Program Urusan
- b. Kegiatan Dinas Kebudayaan berjumlah 15 (lima belas) Kegiatan
- c. Sub Kegiatan Dinas Kebudayaan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan

Kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan/sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 41.118.573.687,- (*empat puluh satu milyar seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*).

Table 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN															
Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	DINAS KEBUDAYAAN						35.468.646.177,00							36.653.019.385,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						35.468.646.177,00							36.653.019.385,00	
-	-						35.468.646.177,00							36.653.019.385,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kebudayaan	100 Persen			100 Persen	22.844.123.535,00						100 Persen	22.924.308.991,00	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen			5 Dokumen	254.669.050,00			-	-	Dinas Kebudayaan	5 Dokumen	254.669.110,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			5 Dokumen	254.669.050,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	5 Dokumen	254.669.110,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	24 Laporan			12 Laporan	13.980.843.189,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN Dinas Kebudayaan	12 Laporan	15.875.281.228,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/ Bulan			80 Orang/ Bulan	13.980.843.189,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	ASN Dinas Kebudayaan	80 Orang/ Bulan	15.875.281.228,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	2 Jenis			1 Jenis	48.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebuadyaan	1 Jenis	48.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	160 Paket			80 Paket	48.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebuadyaan	80 Paket	48.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	10 Jenis Layanan			5 Jenis Layanan	952.200.504,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	5 Jenis Layanan	752.667.512,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			8 Paket	54.665.110,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	8 Paket	54.669.110,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket			16 Paket	378.099.144,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	16 Paket	178.492.124,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8000 Paket			3211 Paket	85.950.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	4000 Paket	86.000.000,00	Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			8 Paket	102.256.250,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	8 Paket	102.256.278,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan			35 Laporan	331.230.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	35 Laporan	331.250.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	6 Jenis Barang			3 Jenis Barang	210.292.616,00			-	-	Dinas Kebudayaan	3 Jenis Barang	713.230.211,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit			8 Unit	102.292.616,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	50 Unit	505.230.211,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	108.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	1 Unit	208.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	4 Jenis			2 Jenis	4.583.038.176,00			-	-	Tenaga Honoror dan THL Dinas Kebudayaan	2 Jenis	4.683.052.380,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	523.879.556,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Tenaga Honoror dan THL Dinas Kebudayaan	12 Laporan	423.880.000,00	Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	4.059.158.620,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Tenaga Honoror dan THL Dinas Kebudayaan	12 Laporan	4.259.172.380,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	6 Jenis			3 Jenis	2.815.080.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	3 Jenis	597.408.550,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit			8 Unit	127.050.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	9 Unit	106.861.760,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit			1 Unit	37.560.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit			130 Unit	94.110.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan	100 Unit	94.150.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	2.556.360.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	Dinas Kebudayaan	2 Unit	346.396.790,00	Dinas Kebudayaan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan	96 Data OPK			96 Data OPK	9.142.778.091,00						96 Data OPK	9.246.964.958,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27 Persen			2,24 Persen	2.603.989.042,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	2,27 Persen	2.777.911.727,00	Dinas Kebudayaan
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	11 Objek			10 Objek	1.526.056.054,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	11 Objek	1.497.386.722,00	Dinas Kebudayaan
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Kebudayaan														
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1400 Orang			500 Orang	1.077.932.988,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	700 Orang	1.280.525.005,00	Dinas Kebudayaan
2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase pelestarian kesenian tradisional	2,27 Persen			2,24 Persen	1.538.789.049,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	2,27 Persen	1.469.053.231,00	Dinas Kebudayaan
2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	11 Objek			10 Objek	1.165.414.208,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	11 Objek	1.165.414.499,00	Dinas Kebudayaan
2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	24 Sertifikat			12 Sertifikat	373.374.841,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	12 Sertifikat	303.638.732,00	Dinas Kebudayaan
2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	2 Lembaga			1 Lembaga	5.000.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Adat Provinsi, Lembaga Adat Kab/ Kota, Masyarakat Adat dan Pelaku Seni	1 Lembaga	5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek			1 Objek	5.000.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Lembaga Adat Provinsi, Lembaga Adat Kab/ Kota, Masyarakat Adat dan Pelaku Seni	1 Objek	5.000.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional Yang Dikembangkan	2,21 Persen			2,21 Persen	285.729.919,00						2,21 Persen	1.285.729.919,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan Kesenian	100 Persen			100 Persen	285.729.919,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni, Lembaga Kesenian	100 Persen	1.285.729.919,00	Dinas Kebudayaan
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi Dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Tuntutan														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	20 Sertifikat			10 Sertifikat	150.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni, Lembaga Kesenian	10 Sertifikat	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga			12 Lembaga	135.729.919,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni, Lembaga Kesenian	12 Lembaga	1.135.729.919,00	Dinas Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah Yang Dibina	50 Objek			50 Objek	459.056.387,00						50 Objek	459.056.773,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sejarah Lokal Kab/Kota yang dibina	24 Kab/ Kota			12 Kab/ Kota	459.056.387,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	12 Kab/ Kota	459.056.773,00	Dinas Kebudayaan
2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi														
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang			10 Orang	99.999.972,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	20 Orang	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data Dan Informasi Sejarah														
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen			1 Dokumen	126.768.415,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Dokumen	156.768.773,00	Dinas Kebudayaan
2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal														
		Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen			1 Dokumen	232.288.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Dokumen	152.288.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilindungi	146 Objek			146 Objek	2.736.958.245,00						146 Objek	2.736.958.744,00	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase penetapan cagar budaya peringkat Provinsi	10 Persen			5 Persen	436.958.540,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	5 Persen	436.958.744,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	40 Objek			20 Objek	149.999.860,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	20 Objek	150.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30 Objek			15 Objek	286.958.680,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	15 Objek	286.958.744,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang dikelola	4 Objek			2 Objek	2.299.999.705,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	2 Objek	2.300.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	2 Objek			1 Objek	1.100.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Objek	1.100.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek			1 Objek	800.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Objek	800.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek			1 Objek	200.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	1 Objek	200.000.000,00	Dinas Kebudayaan
2.22.05.1.02.0004	Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														
		Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang			10 Orang	199.999.705,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat	10 Orang	200.000.000,00	Dinas Kebudayaan

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	UPT. MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA						5.649.927.510,00							5.800.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.649.927.510,00							5.800.000.000,00	
-	-						5.649.927.510,00							5.800.000.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Yang Dilindungi Dan Dikembangkan	96 Data OPK			96 Data OPK	2.500.000.000,00						96 Data OPK	2.500.000.000,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kebudayaan Lintas Kabupaten/ Kota yang dikelola	2,27 Persen			2,24 Persen	2.500.000.000,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	2,27 Persen	2.500.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	11 Objek			4 Objek	1.500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah, Dak Non Fisik-Bop Museum Dan Taman Budaya- Taman Budaya	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	11 Objek	1.500.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, Dan Pranata Kebudayaan														
		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1400 Orang			200 Orang	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah, Dak Non Fisik-Bop Museum Dan Taman Budaya- Taman Budaya	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	700 Orang	500.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Budaya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	2 Unit			1 Unit	500.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah, Dak Non Fisik-Bop Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	500.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Museum	85 Poin			85 Poin	3.149.927.510,00						85 Poin	3.300.000.000,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Nilai Akreditasi Museum	A Nilai			B Nilai	3.149.927.510,00			-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	A Nilai	3.300.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu														
		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	10 Unit			5 Unit	750.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah, Dak Non Fisik-Bop Museum Dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	5 Unit	750.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang			5 Orang	150.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	5 Orang	150.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan Dan Akses Masyarakat Terhadap Museum														

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Unit			1 Unit	1.549.999.700,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Pendapatan Asli Daerah, Dak Non Fisik-Bop Museum Dan Taman Budaya- Taman Budaya	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	1.600.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Museum														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	250.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana Dan Prasarana Museum														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	2 Unit			1 Unit	499.927.810,00	Kota Pekanbaru, Marpoyan Damai, Tangkerang Tengah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	Masyarakat, Pelaku Seni	1 Unit	550.000.000,00	Upt. Museum Sang Nila Utama Dan Taman Budaya
J U M L A H							41.118.573.687,00							42.453.019.385,00	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Uraian rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Daerah Provinsi Riau.

Dalam perjalanannya, apabila terdapat suatu kendala dimana dana yang tersedia belum memenuhi kebutuhan yang tercakup pada Renja Tahun 2025 ini maka kegiatan-kegiatan yang belum terealisasi dapat diusulkan kembali pada perubahan rencana kerja tahun berjalan dan rencana kerja tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan/sub kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan pada unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan kebudayaan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku serta mempedomani visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.
2. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban untuk melaksanakan Renja PD ini sesuai dengan yang termuat di dalam tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan/sub kegiatan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
3. Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berkewajiban menjamin konsistensi pencapaian target pembangunan sesuai RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Renja Tahun 2025 dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), selanjutnya RKA juga sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Pagu anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif, dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 selain mengacu pada Renja ini disusun berdasarkan standar biaya, standar akuntansi pemerintah, dan kebijakan penganggaran pemerintah.

Pekanbaru, Juni 2024
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau,

R. YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Madya

NIP. 19681107 199503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
قمرينته قروقيني رياو
DINAS KEBUDAYAAN
دينس كبوداياان
Jalan Jenderal Sudirman No. 194, Tangkerang Tengah
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
NOMOR Kpts. 12/DISBUD/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode RPJMD Berakhir pada tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 20005 – 2025;
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025, sebagaimana terdapat pada lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025, sebagaimana terdapat pada lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Renja Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi;
 2. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana 4 sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
 3. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 08 Januari 2024



**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

R. YOSERIZAL ZEN

Pembina Utama Madya

NIP. 19681107 199503 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 12/DISBUD/2024
Tanggal : 08 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Anggota
6.	Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
7.	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Anggota
8.	Kepala Bidang UPT. Taman Budaya dan Museum Sang Nila Utama	Anggota
9.	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota
10.	Jannata Ardhi, SKM	Operator
11.	Ricko Harlius, SE	Operator
12.	Qodri Nela Antani, S.pd	Operator

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 08 Januari 2024



**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

R. YOSERIZAL ZEN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681107 199503 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Riau
Nomor : Kpts. 12/DISBUD/2024
Tanggal : 08 Januari 2024

**AGENDA KERJA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2025**

NO.	URAIAN	JADWAL
1	2	3
1.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Desember 2024
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja	Januari 2024
3.	Penyempurnaan Rancangan Awal Renja	Februari 2024
4.	Penyusunan Rancangan Renja	Maret 2024
5.	Penyusunan Rancangan Akhir Renja	Mei 2024
6.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Juni 2024

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 08 Januari 2024



**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI RIAU**

R. YOSERIZAL ZEN
Pembina Utama Madya
NIP. 19681107 199503 1 003

Formulasi Penghitungan Target Indikator Tujuan dan Sasaran

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Target 2025		Target 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Pemajuan Budaya Melayu Riau	$\frac{\text{Jumlah OPK yang dimajukan}}{11 \text{ OPK}} \times 100\%$	$\frac{6}{11} \times 100\%$	54,54	$\frac{7}{11} \times 100\%$	63,63
2	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi	$\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$	$\frac{3143}{3810} \times 100\%$	82,50	$\frac{3223}{3810} \times 100\%$	84,60
3	Persentase Budaya Melayu Riau yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan}}{\text{Jumlah data obyek pemajuan kebudayaan}} \times 100\%$	$\frac{460}{3810} \times 100\%$	12,00	$\frac{533}{3810} \times 100\%$	14,00
4	Nilai Ekspresi Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Ekspresi Budaya $D_5 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_{5.i} = \frac{S_{5.1} + S_{5.2} + S_{5.3} + S_{5.4}}{4}$ $S_{5.i} = \frac{X_{5.i} - \min(X_{5.i})}{\max(X_{5.i}) - \min(X_{5.i})}, i = 1, 2, 3, 4$	47,69		49,18	
5	Nilai Warisan Budaya	Merupakan Perhitungan Nilai Dimensi Warisan Budaya $D_4 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 S_{4.i} = \frac{S_{4.1} + S_{4.2} + S_{4.3} + S_{4.4} + S_{4.5} + S_{4.6}}{6}$ $S_{4.i} = \frac{X_{4.i} - \min(X_{4.i})}{\max(X_{4.i}) - \min(X_{4.i})}, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$	57,40		58,90	

MATRIKS VERIFIKASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
PROVINSI RIAU TAHUN 2025

Dinas : Kebudayaan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	COVER	JUDUL COVER : “RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) PROVINSI RIAU TAHUN 2025 DINAS/BADAN..... (sesuai Perangkat Daerah masing-masing)	-	V	-	-
2	PERGUB PENETAPAN	Keputusan Gubernur Riau Nomor : 23 tanggal 1 Juli 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025	-	-	-	-
3	DAFTAR ISI	Sesuai dengan Isi Renja Perangkat Daerah	-	V	-	-
4	DAFTAR TABEL	Judul Tabel dan Halaman Tabel	-	V	-	-
5	BAB I PENDAHULUAN					
	1.1. □Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	-	V	-	-
	1.2. Landasan Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	-	V	-	-
	1.3. Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah	-	V	-	-
	1.4. Sistematisa Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	-	V	-	-
6	BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023					
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD	2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	-	V	-	-
		2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	-	V	-	-
		2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;	-	V	-	-
		2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	-	V	-	-
		2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan	-	V	-	-
		2.1.6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.29	-	V	-	-
	2.2. □Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.30	-	V	-	-

Dinas : Kebudayaan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;	-	V	-	-
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;	-	V	-	-
		Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>);	-	V	-	-
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan	-	V	-	-
		Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.	-	V	-	-
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;	-	V	-	-
		Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;	-	V	-	-
		Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.31	-	V	-	-
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh. Misalnya melalui Forum SKPD atau kegiatan lainnya;	-	V	-	-
		Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.32	-	V	-	-
	2.6. Kelompok Sasaran Layanan	Kelompok Sasaran Layanan (dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah)	-	V	-	-
7	BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
	3.1. □Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	-	V	-	-
				V	-	-
	3.2.□Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah	-	V	-	-
	3.3. Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan.	-	V	-	-
		Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan	-	V	-	-
		Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan/sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.	-	V	-	-
		Menggunakan Tabel T-C.33	-	V	-	-

Dinas : Kebudayaan Provinsi Riau

NO	URUTAN SISTEMATIKA	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI			
			INTEGRASI RENSTRA	SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
8	BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Diambil dari SIPD Menu Laporan ==> Renja ==> Penetapan - Penetapan RKPD 2025 (sesuai tahapan)	-	V	-	-
9	BAB V PENUTUP	1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.	-	V	-	-
		2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.	-	V	-	-
		3. Rencana tindak lanjut.	-	V	-	-
		4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah , serta cap perangkat daerah yang bersangkutan.	-	V	-	-
10	LAMPIRAN	1. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 2. Formulasi dan perhitungan target indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu	-	V	-	-

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

1. YUSRI S.Pd.,M.T.,Ph.D

2. EDY YULISMAN, SE, M.Si

3. ISKANDAR, S.Pd.,MM

4. ABD. RAHMAN SIDIQ, S.Sos


.....

.....

.....

.....

Pekanbaru, Juni 2024
Verifikator :

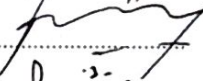
1. RAJA JUARISMAN, ST., M.Si

2. NEIL YULIA, S.E., M.Si

3. MUHAMMAD IKHSAN, S.IP

4. NURBAITY, SE


.....

.....

.....

.....